

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah masalah utama di seluruh dunia, terutama di negara - negara berkembang seperti Indonesia. Sebuah negara sering digolongkan sebagai negara miskin ketika menunjukkan beberapa karakteristik khas. Negara tersebut biasanya mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (melebihi 2 persen setiap tahun), mayoritas tenaga kerjanya terkonsentrasi di sektor pertanian, dan terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Karakteristik-karakteristik ini dapat diamati di berbagai negara yang menghadapi masalah kemiskinan termasuk Indonesia. (Farid et al., 2020). Sebaliknya, keberhasilan suatu negara dapat diukur dengan memakai indikator kemiskinan itu sendiri. Pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* yakni “no poverty” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2015-2030 (Prasetyo & Fitanto, 2023).

Salah satu langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang menyatu ialah dengan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin (Nabilawaty & Hutajulu, 2022). Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang muncul akibat ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan makin lebarnya kesenjangan pendapatan, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah (*inter region income gap*). Di Indonesia isu kemiskinan dan ketimpangan telah ada sejak masa kolonial Belanda yang saat itu mencoba mengatasinya melalui program anti kemiskinan yang dikenal dengan Politik Etis. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya menangani kedua permasalahan ini. Walau berbagai kebijakan dan program telah dijalankan dalam waktu yang lama untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan, kedua masalah ini masih tetap menjadi bagian dari realitas kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini (Kasim, 2021).

Kemiskinan ialah persoalan yang memengaruhi masyarakat di seluruh dunia dan membutuhkan perhatian hingga penanganan serius dari berbagai pihak. Hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara. Meski selama setengah abad terakhir telah terlihat adanya perbaikan dalam taraf hidup masyarakat hingga penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, kenyataannya persoalan ini tetap menjadi hambatan besar bagi negara-negara yang sedang dalam proses pembangunan termasuk Indonesia yang hingga kini masih terus menghadapi tantangan pelik dalam menanggulangi kemiskinan, sebab meskipun tampak rumit dan menyangkut banyak aspek, sejatinya permasalahan ekonomi semacam ini tetap bisa diselesaikan bilamana kita mampu menelusuri sumber utamanya dan merumuskan langkah-langkah penanganan yang tepat hingga berkelanjutan (Ronald Banito et al., 2022).

Kemiskinan merupakan keadaan saat seseorang ataupun sekelompok orang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang kemudian mengakibatkan berbagai masalah. Hal seperti ini bisa berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan lagi upayanya dalam pengentasan kemiskinan (Dinata et al., 2020). Secara umum kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama yakni kemiskinan absolut yang terjadi saat penghasilan individu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal hingga kemiskinan relatif yang muncul karena adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan yang menciptakan jurang kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Masalah kemiskinan menjadi sangat serius terutama di daerah - daerah yang ekonominya tertinggal. Meskipun ada upaya pengembangan ekonomi daerah, kemiskinan tetap menjadi realitas yang nyata. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan dan pola pikir individu. Itu berdampak negatif bagi masyarakat yang kurang mempunyai pengetahuan, padahal pengembangan "*human capital*" melalui pendidikan dapat menjadi kunci peningkatan ekonomi. Seseorang yang terjebak dalam kemiskinan akan mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Bilamana pemerintah tidak menangani masalah kemiskinan dengan baik, hal ini bisa memunculkan

masalah ekonomi, sosial, dan politik yang merugikan negara. Lebih jauh lagi, kemiskinan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik dalam bidang ekonomi negara (Atina & Setyowati, 2022).

Meskipun jumlah penduduk Indonesia telah menyentuh angka sekitar 280,73 juta jiwa pada tahun 2023 dan menempatkannya sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, kenyataannya besarnya populasi tersebut belum cukup untuk mengangkat Indonesia dari status negara berkembang menjadi negara maju yang sejajar dengan kekuatan ekonomi global. (Kesuma & Yasa, 2025). Tingginya angka populasi yang tidak diikuti dengan tingginya kualitas SDMnya justru cenderung menimbulkan berbagai permasalahan social, terutama dalam hal kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi tantangan utama meskipun ada penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut datanya BPS Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 ada di angka 9,36%, atau sekitar 25,90 juta orang. Data ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong cukup tinggi. Tapi, sudah terjadi penurunan pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 9,57%, atau sekitar 26,36 (A. T. Putri & Mardianto, 2025).

Provinsi Jambi yang terletak di kawasan Pulau Sumatera merupakan bagian dari sepuluh provinsi yang membentuk salah satu pulau terbesar di Indonesia bersama Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, hingga Kepulauan Bangka Belitung, tapi di balik luas wilayah dan potensi alam yang dimiliki, Pulau Sumatera justru masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang cukup serius dan menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk, di mana menurut data BPS tahun 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 576.342 ribu jiwa sehingga menjadikannya pulau termiskin kedua setelah Jawa. (Permana & Pasaribu, 2023a). Saat 2021 persentase penduduk miskin paling banyak adanya di Aceh yang mencapai 15,33% dan disusul oleh provinsi Bengkulu mencapai 15,22%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung yakni mencapai 4,9%. Menurut CNBC Indonesia, kondisi ini dikaitkan dengan populasi Aceh yang lebih kecil dibandingkan wilayah Sumatera lainnya. Kemudian pemanfaatan sumber

daya masih belum optimal. Produk dari masyarakat rentan belum mengalami pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai jualnya, contohnya kopi yang sebenarnya sangat diminati pasar global (Putra et al., 2023)

Kemiskinan di berbagai provinsi Sumatera diberi pengaruh oleh banyak faktornya termasuk ketidakseimbangan pembagian keuntungan antara modal dan tenaga kerja. Kesenjangan ini muncul karena pemilik alat produksi (produsen) mempunyai wewenang dalam menentukan kompensasi untuk setiap faktor produksi. Upah pekerja sering ditekan seminimal mungkin untuk memaksimalkan profit produsen. Situasi ini menimbulkan kesenjangan dan permasalahan bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Ia kerja dengan jam kerja panjang tapi hanya menerima upah minimal, sementara kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sangatlah banyak. Berbagai provinsi seperti Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan tinggi dan persentase penduduk miskin yang rendah. Tapi, terdapat juga provinsi-provinsi yang meskipun mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi masih menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung (Barika et al., 2024)

Provinsi Jambi didalamnya ada beberapa wilayah kabupaten atau kota di masih mengalami masalah kemiskinan yang cukup serius. Provinsi Jambi terdiri dari Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh hingga 9 (sembilan) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo. Provinsi Jambi, sebagai daerah otonom, sudah berusaha dan berupaya untuk menekan peningkatan kemiskinan. Tapi, berdasarkan pengamatan di lapangan, belum terlihat perubahan signifikan dalam pengurangan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren peningkatan, terlebih selama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin mencapai 1,27 persen pada tahun 2020, bersamaan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai 0,46 persen (Amali & Devita, 2022). Meski demikian, tren jumlah penduduk miskin di berbagai kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi sejak tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan menurun yang

mencerminkan makin meratanya distribusi pendapatan hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, meski sempat mengalami lonjakan kembali pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda dan mengguncang kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 1.1. Persentasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2021 – 2024

No	Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kerinci	7,71	7,57	7,54	6,93
2	Merangin	9,11	8,70	8,90	8,40
3	Sarolangun	8,87	8,48	8,54	8,36
4	Batanghari	10,05	9,63	9,45	8,63
5	Muaro Jambi	4,53	4,47	4,43	3,65
6	Tanjung Jabung Timur	11,39	10,91	10,85	10,14
7	Tanjung Jabung Barat	10,75	10,00	9,79	9,54
8	Tebo	6,68	6,34	6,46	6,12
9	Bungo	6,23	5,38	5,29	5,06
10	Kota Jambi	9,02	8,33	8,24	7,73
11	Kota Sungai Penuh	3,41	2,97	3,00	2,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Mengacu pada Tabel 1.1 yang didapatinya dari BPS diketahui tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih relative tinggi angkanya. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2024, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat tercatat sebagai dua daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, di mana pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap melonjaknya angka kemiskinan khususnya di Tanjung Jabung Timur yang pada tahun 2021 mengalami

kenaikan signifikan menjadi 11,39 persen dari sebelumnya 10,95 persen pada tahun 2020, sementara itu pada tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di posisi kedua dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,14 persen yang berarti lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jambi yang berada pada angka 7,73 persen menurut data BPS. Maka dari itu, pokok masalah ini harus difokuskan dan ditindak dengan serius oleh pemerintah guna menelaah persoalan ini supaya level dari kemiskinannya di Provinsi Jambi bisa turun secara jumlahnya. Sementara itu, Kota Sungai Penuh konsisten berada di posisi tingkat kemiskinan terendah selama 4 tahun terakhir, yakni 3,41% pada tahun 2021, dan menurun hingga 2,92% di tahun 2024. Dikutip dari (Sanjaya, 2024), berdasarkan data pada BPS Kota Sungai Penuh, kuantitas penduduk miskin di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan, tapi tingkat kemiskinannya masih berada di urutan paling rendah diantara Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jambi.

Kemiskinan ialah permasalahan kompleks yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan, yakni rendahnya pendapatan hingga persoalan seperti buta huruf, rendahnya tingkat kesehatan, kesenjangan gender, dan kondisi lingkungan yang buruk. Permasalahan ini juga erat kaitannya dengan sempitnya peluang kerja, dimana ia yang tergolong miskin umumnya tak mempunyai pekerjaan atau menganggur istilahnya. Masyarakat miskin biasanya juga menghadapi kendala dalam hal akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai (Fusfita & Rosita, 2018). Berbagai macam factor penyebab kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sisi pula, salah satunya dari sisi ekonomi. Kemiskinan bisa disebabkan oleh ketidaksamaan sumber daya yang berakibat pada tidak meratanya distribusi pendapatan. Kedua, ketidaksamaan kualitas SDM yang juga menyebabkan kemiskinan. Hal lain yang dapat memicu munculnya masalah kemiskinan ialah ketidakseimbangan akses dalam modal (Atina & Setyowati, 2022).

Pemberantasan kemiskinan salah satunya dapat diwujudkan dengan menaikkan kualitas masyarakatnya, sehingga ikut hingga dalam mengatasi permasalahan dan tercapainya pembangunan di berbagai sector. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bergantung pada besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ditentukan oleh tingkat investasi dan kualitas

SDMnya. Sumber daya yang berkompetensi diharapkan mampu berperan aktif dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat kemiskinan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan suatu daerah atau wilayah bukan hanya ditakar dari taraf pendapatan, tetapi juga terdapat hal atau indikator lain, yakni pembangunan SDMnya (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022). Guna membentuk SDM yang berkualitas dibutuhkan terpenuhinya secara menyeluruh akses terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah otonom, sebab ketika Indeks Pembangunan Manusia berada pada tingkat yang rendah maka akan muncul serangkaian dampak yang saling berkelindan mulai dari kualitas tenaga kerja yang tidak optimal hingga turunnya produktivitas yang kemudian mempersempit akses terhadap lapangan pekerjaan dan menekan tingkat pendapatan sehingga masyarakat makin sulit keluar dari jeratan kemiskinan yang pada akhirnya menciptakan pola kemiskinan yang berulang tanpa ujung dan seakan tak mampu diputus. (Nalle et al., 2022).

Tabel 1.2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi tahun 2021 – 2024

No	Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kerinci	72,72	73,24	73,77	74,33
2	Merangin	70,55	70,98	71,81	72,65
3	Sarolangun	72,02	72,66	73,05	73,76
4	Batanghari	71,61	71,99	72,50	73,12
5	Muaro Jambi	70,79	71,41	72,26	73,11
6	Tanjung Jabung Timur	68,09	68,96	69,85	70,77
7	Tanjung Jabung Barat	70,26	70,88	71,44	72,01
8	Tebo	70,73	71,14	71,99	72,67
9	Bungo	72,70	73,08	73,57	74,44
10	Kota Jambi	79,94	80,38	80,93	81,77
11	Kota Sungai Penuh	76,30	76,75	77,20	77,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2024.

Pada tahun 2024, Kab Tanjung Jabung Timur mengalami pergeseran status dari kategori pembangunan manusia “sedang” menuju “tinggi” dengan capaian nilai IPM mencapai 70,77 yang kemudian berkontribusi terhadap peta sebaran IPM di Provinsi Jambi di mana kini hanya terdapat satu daerah yakni Kota Jambi yang masuk kategori “sangat tinggi” dengan IPM di atas 80 sementara sepuluh kabupaten atau kota lainnya berada pada kategori “tinggi” dan tidak ada lagi daerah yang termasuk dalam status “sedang” maupun “rendah”. Kota Jambi memegang tahta tertinggi daripada IPM dari seluruh wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jambi selama 4 tahun terakhir. Itu bisa dilihat dari nilai IPM yang mengalami tren peningkatan selama 4 tahun terakhir ini, yatu dari 79,94% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 80,38% pada tahun 2022 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 kemarin, yakni mencapai 81,77%. Pada tahun 2024,

IPM Kota Jambi termasuk pada kategori sangat tinggi bilamana dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya.

Kota Jambi telah mencapai kategori pembangunan manusia “tinggi” sejak 2018 dan terus menunjukkan tren positif selama periode 2021 hingga 2024 dengan rata-rata pertumbuhan IPM mencapai 0,80 persen per tahun dari angka 79,94 menjadi 81,77 di mana menurut pandangan teori ekonomi peningkatan dalam capaian IPM semacam ini diyakini mempunyai keterkaitan erat terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara langsung di suatu wilayah. Kajiannya (Zanzibar et al., 2024) dan (Febrianti et al., 2024) menemui bahwasanyasany IPM akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Itu dikarenakan seiring meningkatnya indeks pembangunan manusia, produktivitas manusia juga ikut meningkat dan akan mengurangi kemiskinan. Tapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Santi Situmorang et al., 2024), indeks pembangunan manusia justru tidak punya pengaruh dan berdampak terhadap kemiskinan di Kota Palangkaraya selama satu decade terakhir. Itu membuktikan bahwasanya tak selamanya fakta di lapangan sejalan dengan teori yang ada.

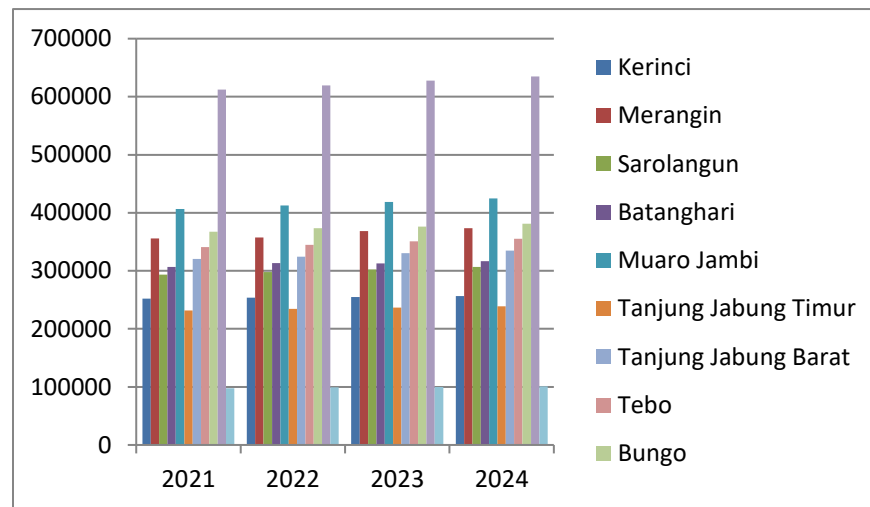
Metode kebutuhan dasar dipakai oleh BPS guna menilai level kemiskinan. Menurut acuan ini, kemiskinan dimaknai jadi ketidakcakapan guna mencukupi keperluan dasarnya seperti karena kurangnya sumber daya keuangan atau pengeluaran. Suatu cara untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ialah dengan menumbuhkan tingkat pendapatan masyarakat (Islami & Anis, 2019). Itu bisa diraihny melalui penerapan kebijakan kenaikan upah minimum, baik di tingkat regional maupun kabupaten/kota. Implementasi kebijakan tersebut terbukti efektif dalam memperbaiki kondisi ekonomi para pekerja yang sebelumnya berpenghasilan rendah (Kurniawati et al., 2017). Ketika upah minimum dinaikkan, masyarakat akan punya sebuah daya beli yang besar yang kemudian menyokong peningkatan konsumsi dan tingkat kesejahteraan mereka. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Secara umum, upah minimum regional mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kebijakan upah minimum dapat efektif mengurangi kemiskinan dengan syarat nilai upah minimum rill harus lebih tinggi dari tingkat inflasi yang berlaku, hingga didukung oleh kualitas tenaga

kerja yang tinggi. Maka dari itu, daya beli riil masyarakat dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan (Faras et al., 2021). Menurut (Aleffin & Imaningsih, 2024) upah minimum berdampak terhadap kemiskinan. Itu didorong pula dengan kajiannya (Munarni et al., 2024) dimana kenaikan upah minimum menjadi cemerin akan pendapatan pekerja akan lebih tinggi dan meminimalisir tingkat kemiskinannya. Akan tetapi (Rivana & Gani, 2024) dan (Amalia et al., 2024) mempunyai pendapat yang berbeda dan berkontradiksi dengan teori yang ada. Menurut kajiannya, naik turunnya upah minimum tidak punya pengaruh atas tingkat kemiskinan, sebab kenaikan upah minimumnya itu dapat menekan angka pengurangan tenaga kerja dan memperparah kemiskinan bagi pengangguran.

Penanggulangan kemiskinan yang mempunyai banyak dimensi menuntut peningkatan mutu SDM sampai membutuhkan peran nyata dari kebijakan otonomi daerah terutama dalam hal pengelolaan anggaran di mana pemerintah daerah harus mampu menyusun prioritas belanja yang benar-benar menyasar pada upaya pengurangan kemiskinan dengan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti belanja modal yang dalam pandangan keuangan daerah memegang peran penting dalam mendorong kesejahteraan publik. (AC et al., 2023). Pengeluaran belanja modal merupakan bagian dari struktur anggaran yang difokuskan untuk memperoleh aset-aset dengan daya guna jangka panjang yang mencakup lebih dari satu tahun anggaran, termasuk di dalamnya pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur seperti gedung, penyediaan perlengkapan kerja, hingga akuisisi aset tidak berwujud, di mana karakter utama dari jenis belanja ini ialah pemanfaatannya harus ditujukan pada aset yang masa pakainya melampaui batas waktu 12 bulan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (Susilowati et al., 2017). Di Provinsi Jambi yang punya 9 kabupaten dan 2 kota, alokasi belanja modal menjadi instrumen strategis dalam menumbuhkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Selama periode 2015-2024, pola belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2015-2019, tren belanja modal cenderung meningkat seiring dengan fokus pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Tapi, pada tahun 2020 terjadi perubahan

signifikan dalam pola belanja modal akibat pandemi COVID-19, dimana banyak daerah melaksanakan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Memasuki periode 2021-2023, pemerintah kabupaten/kota di Jambi mulai melaksanakan penyesuaian belanja modal dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur digital. Beberapa daerah seperti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan peningkatan signifikan dalam alokasi belanja modal untuk mendukung program *smart city* dan digitalisasi pelayanan publik. Penggunaan belanja modal berpeluang besar menekan angka kemiskinan karena pembiayaan sektor-sektor vital seperti fasilitas umum, layanan pendidikan, hingga kesehatan mampu mendorong peningkatan taraf hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. (C. Putri & Yefriza, 2025). Selaras atas kajiannya (Abdillah et al., 2024), dimana kenaikan belanja modal akan menurunkan kemiskinan karena dapat mendorong kesempatan kerja dan percepatan pembangunan. Tapi masih ada fakta di lapangan yang bertentangan dengan teori, misalnya penelitian yang dilaksanakan oleh (Rahmawati et al., 2024), bahwasanya belanja modal ternyata bisa menaikkan level kemiskinan, itu disebabkan karena belanja modal belum dipakai secara tepat untuk pengentasan kemiskinan.

Kemudian ada UMK, dan belanja modal yang diasumsikan punya pengaruh pada kemiskinan ialah jumlah penduduk. Ketika pertumbuhan jumlah penduduk melaju pesat tapi tidak diiringi dengan peningkatan mutu SDM yang mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai maka akan muncul beragam persoalan sosial ekonomi seperti membengkaknya angka pengangguran, melemahnya pendapatan per kapita, hingga turunnya daya beli yang akhirnya menyeret masyarakat ke dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus karena peningkatan populasi justru menambah beban pembangunan terutama bilamana kualitas tenaga kerja belum mampu bersaing di tengah ketatnya dinamika pasar kerja saat ini. (Nalle et al., 2022).



Gambar 1.1. Jumlah Penduduk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020 – 2024 (ribu jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2024

Dari gambar 1.1 dijabarkan jumlah penduduk yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi dalam periode 2021 – 2024. Jumlah penduduk tertinggi dari tahun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berada di Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi, yakni mencapai 612.200 ribu jiwa saat 2021, dan melonjak naik sampai 635.100 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya ialah Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2021 jumlah penduduknya hanyalah mencapai 97.800 ribu jiwa dan pada tahun 2024 melonjak jadi 100.800 jiwa.

Kenaikan jumlah penduduk di wilayah kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berpotensi menimbulkan konsekuensi ganda terhadap kondisi kemiskinan karena di satu sisi pertambahan tersebut bisa menjadi kekuatan pendorong pembangunan bilamana disertai dengan peningkatan kapasitas SDM tapi di sisi lain bilamana pertumbuhan penduduk berlangsung secara tidak terkendali maka justru akan menambah tekanan terhadap ketersediaan pekerjaan dan layanan publik yang penting bagi masyarakat sehingga dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang dan inklusif perlu dipastikan bahwasanya laju pertumbuhan jumlah penduduk tidak melampaui pertumbuhan ekonomi wilayah karena bilamana tidak dikendalikan

maka lonjakan populasi berisiko menurunkan tingkat kesejahteraan dan dalam jangka panjang akan memperluas jumlah penduduk miskin di daerah berkembang. Menurut (Wee et al., 2024) dan (Faidiban et al., 2025) penambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan kemajuan di sektor-sektor pendukung pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja tidak akan mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan sehingga golongan miskin justru makin banyak dan sulit keluar dari jerat kemiskinan karena akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi kian terbatas. Tapi (Nurdianti & Samsuddin, 2024) justru menyampaikan pandangan yang berbeda bahwasanya penurunan jumlah penduduk bukan sertamerta membawa perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi, melainkan bisa memperburuk situasi kemiskinan karena produktivitas masyarakat menurun dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ikut melemah akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja aktif dalam proses pembangunan.

Mengacu pada penjabaran fenomenanya itu, membuat penulis menguinginkan menjalankan penelitian berjudul **“Determinan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar kepada uraian latar belakangnya, maka rumusan masalah yang dikaji diantaranya:

1. Bagaimana kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 – 2024?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 – 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang diperoleh, maka didapatkan tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui kondisi kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 – 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitiannya ini ialah:

1. Hasil studi ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi factor – factor yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
2. Temuan – temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau menjadi bahan referensi yang berharga untuk penelitian serupa selanjutnya.